

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta⁴⁰

1. Historis

Berdirinya Kota Yogyakarta diawali dari adanya Perjanjian Gianti pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian: Negara Mataram dibagi dua: Setengah menjadi Hak Kerajaan Surakarta, sisanya menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu Pangeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu: Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, dan Grobogan.

Selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini

⁴⁰ Data dapat diperoleh dari situs resmi Pemerintah Kota Yogyakarta www.jogjakota.go.id

diumumkan tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan di atas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono I segera memerintahkan kepada rakyat membatasi hutan tadi untuk didirikan Kraton. Sebelum kraton jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pesanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Pesanggrahan tersebut resminya ditempati pada tanggal 9 Oktober 1755, dari tempat inilah beliau mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki istana baru sebagai peresmian. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono I untuk berpindah menetap di kraton yang baru. Peresmian terjadi tanggal 7 Oktober 1756. Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan di antara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945, dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional. Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi kota praja atau kota otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi kota praja atau kota otonomi dengan lahirnya Undang-undang nomor 17 tahun 1947, dalam pasal 1 menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan

Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut walikota pertama yang dijabat oleh Ir. Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kota Praja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai badan pemerintah harian serta merangkap menjadi pimpinan legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.

Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang nomor 1 tahun 1957 diganti dengan Undang-undang nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas kepala daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk wakil kepala daerah dan badan pemerintah harian serta sebutan kota praja diganti kotamadya. Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, DIY merupakan propinsi dan juga

Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh kepala daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan Daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai undang-undang ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai kepala daerahnya.

2. Lambang dan Identitas

Gambar 2.1:
Lambang Kota Yogyakarta



a. Dasar Hukum

Ketetapan DPRD Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan Lambang Kota Praja Yogyakarta.

b. Makna Lambang

- 1) Perbandingan ukuran 18 : 25, untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (1825).
- 2) Warna. Hitam: Simbol Keabadian. Kuning dan Keemasan: Simbol Keluhuran. Putih: Simbol Kesucian. Merah: Simbol Keberanian. Hijau: Simbol Kemakmuran.
- 3) *Mangayu Hayuning Bawono*: Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat.
- 4) Bintang Emas: Cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan usaha di bidang kemakmuran. Padi dan kapas: Jalan yang ditempuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang.
- 5) Perisai : Lambang Pertahanan.

- 6) Tugu : Ciri khas Kota Yogyakarta.
- 7) Dua sayap : Lambang kekuatan yang harus seimbang.
- 8) Gunung: Lambang kebudayaan. Beringin Kurung: Lambang Kerakyatan. Banteng: Lambang semangat keberanian. Keris: Lambang perjuangan.
- 9) Terdapat dua sengkala. *Gunaning Keris Anggatra* Kota Praja: Tahun 1953 merupakan tahun permulaan pemakaian Lambang Kota Yogyakarta. *Warna Hasta Samadyaning* Kota Praja: Tahun 1884.

c. Flora dan Fauna Identitas Kota Yogyakarta

Dalam rangka menumbuhkan menjadi kebanggaan dan maskot daerah telah ditetapkan pohon Kelapa Gading (*Cocos Nucifera* vv. *Gading*) dan Burung Tekukur (*Streptoplia Chinensis Tigrina*) sebagai flora dan fauna identitas Kota Yogyakarta.

Keberadaan pohon Kelapa Gading begitu melekat pada kehidupan masyarakat Yogyakarta, karena dikenal sebagai tanaman raja serta mempunyai nilai filosofis dan budaya yang sangat tinggi, sebagai kelengkapan pada upacara tradisional/religius, mempunyai makna simbolis dan berguna sebagai obat tradisional.

Burung tekukur dengan suara merdu dan sosok tubuh yang indah mampu memberikan suasana kedamaian bagi yang mendengar, menjadi kesayangan para pangeran di lingkungan kraton. Dengan mendengar suara burung tekukur diharapkan orang akan terikat kepada Kota Yogyakarta.

3. Visi dan Misi

a. Visi Kota Yogyakarta

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat *Mangayu Hayuning Bawana*.

b. Misi Kota Yogyakarta

- 1) Menjadikan dan mewujudkan lembaga pendidikan formal, non formal dan sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetitif dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berkualitas.
- 2) Menjadikan dan mewujudkan pariwisata, seni dan budaya sebagai unggulan daerah dalam rangka mengembangkan Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata yang berbudaya.
- 3) Menjadikan dan mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.
- 4) Menjadikan dan mewujudkan masyarakat yang menyadari arti pentingnya kelestarian lingkungan yang dijiwai semangat ikut memiliki/*handarbeni*.
- 5) Menjadikan dan mewujudkan masyarakat demokrasi yang dijiwai oleh sikap kebangsaan Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan yang

adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial dengan semangat persatuan dan kesatuan

B. Wilayah⁴¹

1. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY

Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT.

2. Batas Wilayah

Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah Propinsi DIY. Berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah yang berstatus kota di samping 4 (empat) daerah lainnya yang berstatus kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut;

Sebelah utara : Kabupaten Sleman

Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman

Sebelah selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah kota ini terbentang antara 110o 24I 19II sampai 110o 28I 53II Bujur Timur dan 7o 15I 24II sampai 7o 49I 26II Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m di atas permukaan laut.

⁴¹ Diolah dari data unduh situs resmi Pemerintah Kota Yogyakarta www.jogjakota.go.id, dan BPS Kota Yogyakarta, *Kota Yogyakarta dalam Angka 2011*, BPS Kota Yogyakarta, 2011

3. Pembagian Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Tabel 2.1:

Pembagian Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta

No.	Nama Kecamatan	No.	Nama Kelurahan
01.	Kecamatan Mantriheron	01.	Kelurahan Mantriheron
		02.	Kelurahan Suryodiningratan
		03.	Kelurahan Gedongkiwo
02.	Kecamatan Kraton	04.	Kelurahan Kadipaten
		05.	Kelurahan Patehan
		06.	Kelurahan Panembahan
03.	Kecamatan Mergangsan	07.	Kelurahan Wirogunan
		08.	Kelurahan Keparakan
		09.	Kelurahan Brontokusuman
04.	Kecamatan Ngampilan	10.	Kelurahan Ngampilan
		11.	Kelurahan Notoprajan
05.	Kecamatan Pakualaman	12.	Kelurahan Gunungketur
		13.	Kelurahan Purwokinanti
06.	Kecamatan Gondokusuman	14.	Kelurahan Baciro
		15.	Kelurahan Demangan
		16.	Kelurahan Kotabaru
		17.	Kelurahan Klitren
		18.	Kelurahan Terban
07.	Kecamatan Wirobrajan	19.	Kelurahan Wirobrajan
		20.	Kelurahan Patangpuluhan
		21.	Kelurahan Pakuncen
08.	Kecamatan Gondomanan	22.	Kelurahan Prawirodirjan
		23.	Kelurahan Ngupasan
09.	Kecamatan Tegalrejo	24.	Kelurahan Kricak
		25.	Kelurahan Karangwaru
		26.	Kelurahan Tegalrejo

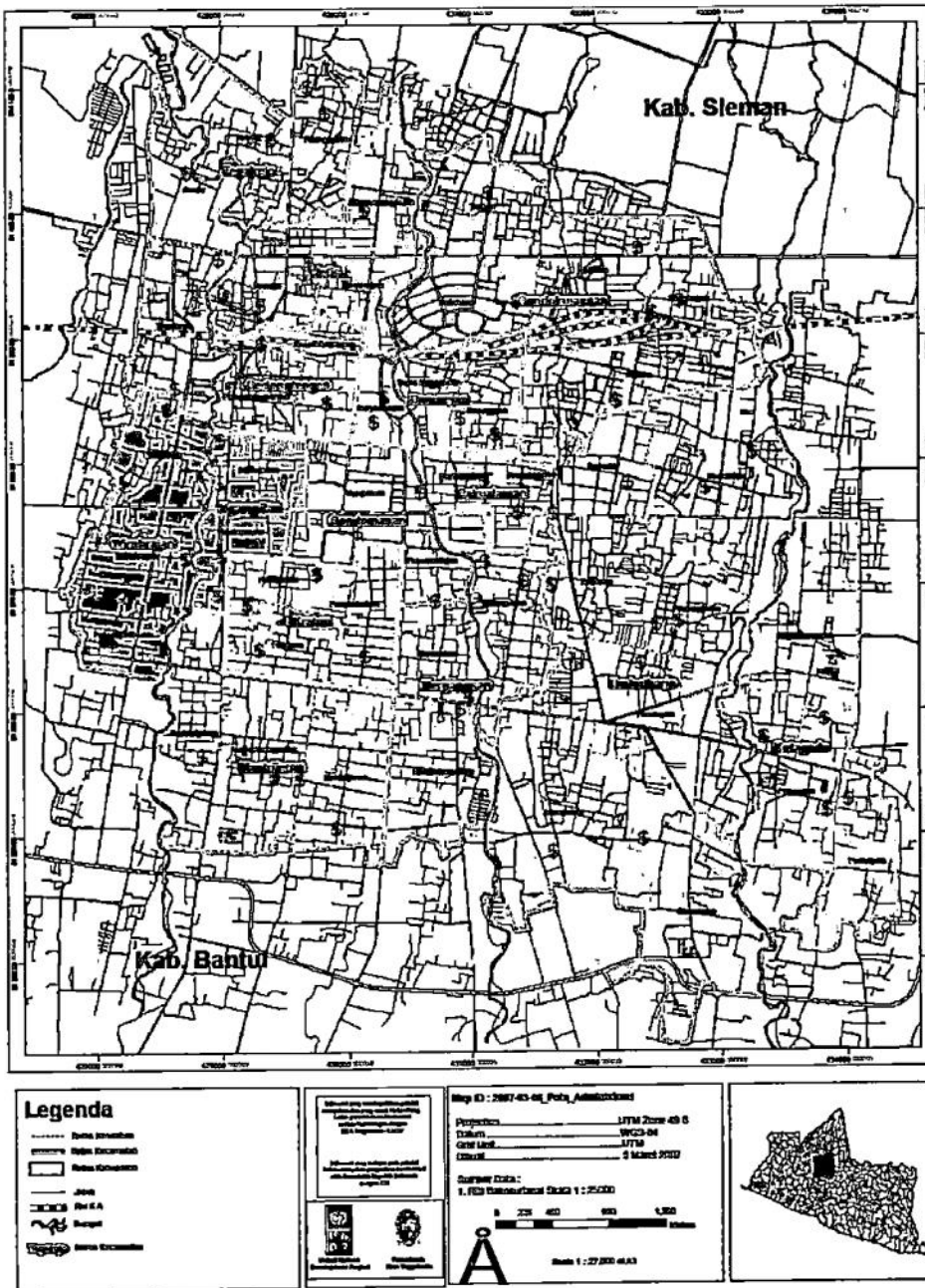
		27.	Kelurahan Bener
10.	Kecamatan Jetis	28.	Kelurahan Bumijo
		29.	Kelurahan Gowongan
		30.	Kelurahan Cokrodiningratan
11.	Kecamatan Danurejan	31.	Kelurahan Tegalpanggung
		32.	Kelurahan Suryatmajan
		33.	Kelurahan Bausasran
12.	Kecamatan Umbulharjo	34.	Kelurahan Semaki
		35.	Kelurahan Warungboto
		36.	Kelurahan Pandeyan
		37.	Kelurahan Sorosutan
		38.	Kelurahan Giwangan
		39.	Kelurahan Muja-muju
13.	Kecamatan Kotagede	40.	Kelurahan Tahunan
		41.	Kelurahan Rejowinangun
		42.	Kelurahan Prenggan
14.	Kecamatan Gedongtengen	43.	Kelurahan Purbayan
		44.	Kelurahan Pringgokusuman
		45.	Kelurahan Sosromenduran

Diolah dari BPS, Kota Yogyakarta dalam Angka 2011

4. Peta Kota Yogyakarta

Gambar 2.2:

PETA ADMINISTRASI KOTA YOGYAKARTA



Sumber: www.jogjakota.go.id

C. Keadaan Penduduk, Tenaga Kerja, dan Komunikasi⁴²

1. Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 397.398 jiwa yang terdiri dari 194.530 orang (48,95%) laki-laki dan 202.868 orang (51,05%) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil SUPAS tahun 2005 sebanyak 435.236 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 2000-2005 sebesar 1,9%. Dengan luas wilayah 32,50 km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 14.239 jiwa per km².

2. Tenaga Kerja

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2009 tercatat 9.852 orang, yang terdiri dari 89,55% Pegawai Pemerintah Daerah dan 10,45% Pegawai Pemerintah Pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan, di Kota Yogyakarta terdapat Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan I 3,20%, golongan II 20,19%, golongan III 46,42%, dan sisanya golongan IV 30,19%.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2009 sebanyak 9.588 orang yang terdiri dari 4.452 laki-laki dan 5.136 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan sarjana yaitu 62,24%, kemudian diikuti yang berpendidikan SMU (22,41%), Diploma (11,93%) dan sisanya berpendidikan S2, SMP, dan SD.

⁴² *Ibid*

3. Radio

Sarana komunikasi radio merupakan sarana komunikasi elektronik massal yang sampai saat ini masih banyak digemari masyarakat. Jumlah stasiun radio swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2009 mencapai 15 stasiun.

D. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat⁴³

1. Pendidikan

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, karena hampir 20% penduduk produktifnya adalah pelajar dan terdapat 137 perguruan tinggi. Kota ini diwarnai dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, predikat tersebut memiliki riwayat yang cukup panjang. Dari waktu ke waktu jumlah penduduk bersekolah secara umum mengalami peningkatan dengan keberadaan jumlah guru mengalami hal yang sama, yaitu mengalami peningkatan. Dengan demikian, diharapkan mutu pendidikan akan menjadi lebih baik seiring membaiknya rasio guru dan murid.

2. Agama

Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2009 sebanyak 374.816 orang atau 79,86% dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain

⁴³ *Ibid*

adalah 12,00% Katholik, 7,43% Protestan, 0,23% Hindu, 0,45% Budha dan 0,03% lainnya.

Seperti kebanyakan Islam di kota-kota pedalaman Jawa, mayoritas masyarakat masih mempertahankan tradisi Kejawen yang cukup kuat.

Yogyakarta juga menjadi tempat lahirnya salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Kauman, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Hingga saat ini, Pengurus Pusat Muhammadiyah masih tetap berkantor pusat di Yogyakarta.

E. Kondisi Sosial dan Politik Masyarakat dan Perolehan Suara Lima Partai Utama pada Pemilu 2004 dan 2009 di Kota Yogyakarta

1. Kondisi Sosial dan Politik Masyarakat Kota Yogyakarta pada Pemilu 2004 dan 2009

Masyarakat Kota Yogyakarta tersusun secara hierarkhis mengikuti pola hubungan *patron-client* dimana kesultanan Yogyakarta memiliki otoritas politik. Kesultanan dan kraton menjadi ciri khas semacam sebuah badan yang punya otoritas budaya, termasuk kehidupan sosial dan politik masyarakat di dalamnya.

Mayoritas masyarakat Kota Yogyakarta mengenal secara dekat nilai-nilai budayanya. Hingga kini sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta masih memegang teguh tradisi para pendahulu mereka sehingga budaya Jawa di Kota Yogyakarta masih terjaga dengan cukup baik. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan budaya antara masyarakat Kota Yogyakarta

dan kraton. Kraton di Yogyakarta mengukuhkan perannya menjadi penjaga nilai dan budaya.

Meski di satu sisi kita tidak bisa memungkiri bahwa perubahan budaya karena globalisasi, modernisasi, dan bahkan nasionalisme telah menggeser posisi kraton menjadi sekedar penjaga nilai dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta. Namun di sisi lain, dapat dilihat bahwa Kraton Yogyakarta tetap mempunyai pengaruh dan otoritas dalam masyarakat Kota Yogyakarta. DIY secara luas termasuk di dalamnya Kota Yogyakarta dalam peta kebudayaan Jawa termasuk wilayah yang mewarisi daerah pusat kerajaan dan kebudayaan. Dahulu hingga dalam beberapa hal saat ini, nilai-nilai budaya lahir dari dalam lingkungan kraton sebagai dasar untuk bersikap dan berperilaku bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Otoritas politik merupakan sebuah otoritas yang memberikan alasan untuk tindakan, bukan alasan untuk berpikir, sehingga otoritas politik disebut otoritas praktis. Otoritas dalam kebudayaan Jawa terletak pada sifat dasar otoritas, sumber otoritas, sifat otoritas, dan legitimasi dari otoritas, ia bersumber dari wahyu Ilahi yang diberikan kepada orang-orang terpilih sehingga legitimasi dari otoritas tidak berasal dari rakyat yang dipimpin tetapi dari ranah supernatural. Dengan konsep otoritas seperti ini, otoritas seorang raja berakhir ketika wahyu Ilahi tersebut berpindah ke orang lain. Perpindahan wahyu ini bisa dilihat oleh rakyat jelata dari penurunan kepemimpinan atau kekalahan raja dalam peperangan. Otoritas dalam kebudayaan Jawa tidak bisa dipertanyakan oleh rakyat. Kekuasaan raja

bersifat absolut karena kekuasaan raja adalah tanggung jawab yang diberikan langsung oleh Tuhan melalui pemberian wahyu.

Otoritas politik kraton dalam masyarakat Jawa tradisional meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat karena kraton adalah pusat dari kehidupan. Kraton adalah asal dari kehidupan itu sendiri sehingga pengaturan kehidupan diberikan seluruhnya kepada kraton. Otoritas sultan dalam masyarakat tradisional Kota Yogyakarta terlegitimitasi oleh budaya dan kultur masyarakat. Bagi masyarakat tradisional Kota Yogyakarta, tiap kata sultan adalah hukum karena sultan bukan sekedar seseorang yang kebetulan memegang kekuasaan tetapi seseorang yang didukung oleh segenap kekuatan magis pusaka-pusaka kerajaan.

Peran kraton dalam ranah sosial dan budaya adalah sentral karena kraton adalah salah satu locus pendidikan budaya dimana nilai dan budaya mengalir ke bawah paling deras.⁴⁴ Selain itu, peran kraton dalam pelaksanaan adat dan tradisi sangat penting karena pelaksanaan adat dan tradisi termasuk dalam pemeliharaan kekuasaan kraton itu sendiri.

Akan tetapi, perubahan perilaku dan gaya hidup juga terjadi di Kota Yogyakarta terutama pada generasi muda dan dikarenakan pula banyaknya pendatang musiman di Kota Yogyakarta. Interpretasi nilai-nilai lokal sudah mulai berubah, bentuk dari perubahan perilaku yang tampak adalah berubahnya hubungan sosial di dalam masyarakat. Hubungan kekeluargaan di dalam masyarakat Kota Yogyakarta sudah mulai berkurang akibat gaya

⁴⁴ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006

hidup modern yang mendorong orang untuk bersifat individualis. Hubungan elemen masyarakat saat ini bersifat lebih praktis dan orang-orang dapat menikmati kebebasan individual, bebas dari kekangan komunal masyarakat. Selain itu, penggunaan sistem kasta sudah hampir dihilangkan dalam kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta. Etika penghormatan tradisional terhadap orang-orang berkasta tinggi seperti ningrat tidak lagi penting bagi sebagian besar generasi muda dan pendatang di Kota Yogyakarta, walaupun menjadi darah biru tetap menjadi kebanggaan dan berstatus tinggi di dalam masyarakat. Falsafah budaya Jawa di Kota Yogyakarta kian luntur dan tidak diterapkan di dalam masyarakat terutama generasi muda dan para pendatang, budaya Jawa sesungguhnya sudah mulai hilang dari masyarakat Kota Yogyakarta.

Perubahan budaya dalam diri masyarakat Kota Yogyakarta telah menggeser nilai-nilai yang dahulu dianut oleh masyarakat tersebut. Walaupun secara falsafah nilai-nilai ini dipahami banyak orang, di dalam berperilaku nilai-nilai ini tidak diterapkan sepenuhnya. Falsafah budaya Jawa sudah menjadi sesuatu yang usang di dalam masyarakat Kota Yogyakarta, sesuatu yang ada tetapi tidak sepenuhnya terpakai. Hal ini tentu berpengaruh pada peran dan posisi kraton di dalam masyarakat Kota Yogyakarta. Pandangan masyarakat berubah dari yang dahulu melihat kraton sebagai sumber otoritas utama di masyarakat, sekarang melihat kraton menjadi cagar budaya yang hanya perlu dilestarikan. Otoritas politik kraton tetap ada di masyarakat bukan karena pengakuan hirarki kesultanan

tetapi pengakuan hirarki pemerintahan Republik Indonesia. Kraton mempunyai otoritas politik di masyarakat karena sultan menjadi gubernur DI Yogyakarta bukan karena beliau menjabat sultan.

Pemilihan umum 2004 merupakan babak baru perjalanan masyarakat Kota Yogyakarta dalam partisipasinya atas memilih wakilnya untuk berperan di kancah nasional, peran dimana diperuntukkan kembali kepadanya sendiri sebagai masyarakat pemilih. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang telah diselenggarakan di republik ini, pemilu 2004 mulai menyuguhkan model politik wajah baru dimana masyarakat pemilih dimanjakan oleh kepastian bisa memilih secara langsung siapa saja yang diamanatkan untuk menentukan nasibnya sendiri. Kekurangan yang dimiliki dalam pelaksanaan pemilu 2004 kemudian diperbaiki demi tercapainya tahap kesempurnaan model demokrasi Indonesia gaya baru, pencapaian paling tampak dari penyempurnaan demokrasi ala pemilu adalah digantikannya sistem nomor urut kandidat di Pemilu 2004 dengan sistem suara terbanyak di Pemilu 2009.

Kondisi sosial politik masyarakat Kota Yogyakarta pada Pemilu 2004 dan 2009 kian berubah dengan hadirnya model pemilu gaya baru ini. Masyarakat Kota Yogyakarta mendasarkan sikap politiknya sesuai dengan nilai yang dianut berdasarkan golongan mana ia tergabung. Masyarakat kian aktif dan terlibat dalam perkembangan politik, tidak mau diam dan berusaha dengan memahami fenomena yang ada. Setiap orang menjadi melek politik, setiap orang akhirnya menandakan pilihan politiknya pada partai tertentu.

Masyarakat Kota Yogyakarta turut menaruh harapan pada partai politik tertentu akan perubahan nasib menuju perbaikan, keadaan ini diawali dengan kesadaran setelah terkungkung begitu lama dengan suguhan pemilu gaya lama yang sering dicap sebagai manifestasi status quo. Meski pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan tonggak awal beralihnya sistem pemerintahan dan sistem politik tanah air, namun perlu diakui bahwa Pemilu 1999 belum begitu menjauhkan pergeseran menuju tatanan pemerintah paling baik. Masa-masa awal berlangsungnya Era Reformasi perlu dipandang sebagai bagian dari transisi menuju tata pemerintahan dan politik yang lebih baik, baru pada Pemilu 2004 dan disempurnakan lagi dalam pelaksanaan Pemilu 2009, masyarakat kian aktif bergeliat di panggung politik.

Masyarakat Kota Yogyakarta dengan *patron-client* yang dimilikinya sesungguhnya tidak menentang kebudayaan yang ada, sosok sultan sebagai panutan dalam berbagai bidang kehidupan tetap tidak digoyahkan meski adanya tuntutan perubahan nasib. Sultan sebagai pribadi politik memiliki pelabuhan sendiri pada partai politik mana ia bernaung, masyarakat Kota Yogyakarta ada pula yang menjadi pendukung partai yang sama, namun ada pula yang memilih bergabung dan menjadi simpatisan pada partai politik yang berbeda. Bukan berarti berbedanya pilihan politik antara sultan dan masyarakat Kota Yogyakarta merupakan pegingkarannya terhadap otoritas yang melekat pada diri sultan. Adalah sultan sendiri yang mengimbau bahwa perbedaan dalam pilihan politik adalah sebuah keniscayaan, masyarakat

berhak menentukan sendiri atas partai politik mana yang dinilai baik dan mampu memperjuangkan kepentingannya. Asas demokrasi yang semacam itu kemudian menjadi pemahaman bersama tiap elemen masyarakat dalam berpolitik, ikut berpartisipasi dalam agenda pemilu.

Pengakuan Sri Sultan Hamengkubuwono IX (ayahnda Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY saat ini) terhadap negara Republik Indonesia mengetengahkan Kraton Yogyakarta sebagai simbol dan penjaga budaya Jawa. Perubahan budaya di dalam masyarakat Kota Yogyakarta menggeser otoritas politik Kesultanan Yogyakarta dengan menggeser legitimasi Kesultanan Yogyakarta. Saat ini, otoritas politik Kesultanan Yogyakarta ada karena status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. Sumber otoritas sultan adalah posisinya sebagai Gubernur DI Yogyakarta, tanpa status ini, Kesultanan Yogyakarta akan sama dengan kesultanan di daerah lain seperti Cirebon dimana kesultanan ada tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengatur daerahnya. Keistimewaan Yogyakarta memberikan kemampuan ini pada Kesultanan Yogyakarta, legitimasi pemerintahan di Yogyakarta diberikan kepada kraton oleh rakyat Yogyakarta karena Kesultanan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia bukan karena kraton adalah lembaga pemerintahan tradisional di Yogyakarta.

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu dimungkinkan semua pihak

bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Masyarakat adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu, karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa ke depan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan, mereka memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat, hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Pada era transparansi dan globalisasi terjadi perubahan yang sangat mendasar dibandingkan pada era-era sebelumnya. Bila pada era sebelumnya pengaruh faktor-faktor pada tataran global relatif kecil dibandingkan dengan pengaruh faktor-faktor yang berkembang pada tataran regional maupun nasional, maka pada era sekarang ini tidak mustahil justru faktor-faktor perkembangan pada tataran global jauh lebih menyentuh langsung terhadap kepentingan dan kebutuhan akan perubahan dibandingkan dengan faktor-faktor yang berkembang di lingkungan regional dan bahkan nasional sekalipun. Kesulitan keluar dari kemelut ekonomi dan hak asasi manusia

merupakan salah satu contoh yang dengan gamblang dapat membuktikan mengenai fenomena baru ini. Betapa pembenahan pada tataran lokal tidak membuahkan perubahan yang berarti ke arah yang positif, karena sangat tergantung pada dominasi faktor-faktor global yang menjadi prasyarat untuk diselesaikan terlebih dahulu. Pemisahan antara otoritas sultan dalam pengaturan masyarakat Yogyakarta tidak diinginkan oleh masyarakat Yogyakarta terjadi karena banyak hal antara lain ketidakpercayaan pada pemerintah pusat, pandangan bahwa sultan adalah manifestasi Tuhan di bumi masih cukup kuat, dan keinginan untuk melestarikan budaya lokal yang unik dari daerah lain.

2. Perolehan Suara Lima Partai Utama pada Pemilu 2004 dan 2009 di Kota Yogyakarta

Perjalanan suatu masyarakat akan selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat sangat strategis, baik faktor-faktor pada tataran global, regional, maupun nasional. Berbagai perubahan dan pergeseran yang terjadi, tentunya membutuhkan langkah-langkah penyesuaian dari elit politik agar dapat tetap mempertahankan eksistensi atau kelangsungan hidupnya untuk dapat mencapai tujuan partainya. Langkah-langkah penyesuaian yang dimaksud harus melibatkan berbagai kekuatan yang ada, baik pada lapisan suprastruktur politik, infrastuktur politik, maupun pada lapisan sub struktur politik. Dengan demikian, maka berbagai kekuatan tersebut secara sinergis akan mampu merumuskan dan melaksanakan strategi yang tepat melalui suatu proses dan mekanisme politik yang demokratis sehingga akan

dihormati, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan kesadaran yang mendalam bagi semua rakyat dan masyarakat pada umumnya.

Amat sulit bila bicara tentang pilihan yang ideal. Untuk itu, selayaknya masyarakat menjadi pemilih atas dasar pertimbangan yang realistis dan rasional, bukan emosional, harus bisa melakukan analisis yang efektif dan objektif. Interaksi antara masyarakat dan partai politik hampir sebagian besar hanya terjadi menjelang dan selama masa pemilihan umum. Partai politik tiba-tiba menghilang ketika pesta demokrasi usai dan para wakil rakyat terpilih duduk di lembaga legislatif. Usainya pemilu dan terpilihnya para anggota lembaga legislatif sekaligus menandai berakhirnya dinamika dan kehidupan partai politik. Terpilihnya mereka membuat aktifitas di partai politik semakin surut. Kegiatan partai politik berpindah ke lembaga legislatif. Padahal justru interaksi partai politik dengan masyarakat merupakan faktor penting dalam membangun pemerintahan yang aspiratif dan berpihak pada kepentingan umum.

Era reformasi muncul sebagai gerakan korektif dan pelopor perubahan-perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan. Gerakan reformasi yang melahirkan proses perubahan dan melengserkan pemerintahan Orde Baru memungkinkan sistem multi partai kembali bermunculan. Harapan peran partai sebagai wadah penyalur aspirasi politik akan semakin baik, meskipun hingga saat ini belum menunjukkan kenyataan. Hal ini terlihat dari berbagai aktifitas pada partai yang masih diwarnai banyaknya partai politik yang tidak mengaktualisasikan aspirasi

rakyat dalam wujud program partai yang akan diperjuangkan. Mirip dengan fenomena lama dimana yang ada hanya janji dan slogan-slogan kepentingan politik sesaat. Meskipun rezim otoriter telah berakhir dan keran demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi rakyat belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan, dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datangnya dari elit politik, penyelenggara pemerintahan, maupun kelompok-kelompok kepentingan. Di lain pihak, institusi pemerintahan tidak jarang berada pada posisi yang seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas kepatutan dan bahkan muncul kecenderungan yang mengarah anarkis walau polanya tidak melembaga dan lebih banyak bersifat kontekstual.

Pemilihan umum legislatif sudah dilaksanakan sebanyak 10 kali di Indonesia. Pelaksanaan pemilu tersebut yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009.

Pemilihan Umum 2004 dinyatakan sebagai pemilu paling rumit dalam sejarah demokrasi. Dalam sidang umum tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengamandemen Undang-undang Dasar 1945. Di antara amandemen tersebut, terdapat perubahan dalam badan legislatif. Dimulai dari tahun 2004, MPR akan terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Karena

semua kursi di MPR akan dipilih secara langsung, militer diminta untuk dihilangkan dari dewan perwakilan. Perubahan pola pemilu legislatif di atas dan ditambah dengan model pemilihan langsung presiden/wakil presiden merupakan langkah besar bagi Indonesia untuk mencapai demokrasi.

Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (biasa disingkat pemilu legislatif atau pileg) diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia untuk tiap-tiap satu periode. Pemilu 2004 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih anggota legislatif periode 2004-2009, sedangkan Pemilu 2009 diadakan serentak pula oleh KPU pada tanggal 9 April 2009 (sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April, namun kemudian diundur) untuk memilih anggota legislatif periode 2009-2014.

Pemilihan Umum Anggota DPR RI dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalah partai politik. Pada Pemilu 2004 pemungutan suara dan penentuan kursi ditentukan berdasarkan nomor urut, akan tetapi lain halnya dengan Pemilu 2009 dimana pemilu ini adalah yang pertama kalinya menetapkan calon anggota DPR tidak lagi berdasarkan nomor urut melainkan menetapkan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak yang ditentukan langsung oleh pemilih dalam memilih.

Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi yang ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk. Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk salah satunya yakni Kota Yogyakarta, jumlah kursi DPR RI yang diperebutkan sebanyak 8 (delapan) kursi.

Banyaknya partai politik peserta Pemilu 2004 adalah 24 partai politik. Komposisi urutan partai politik lima teratas berdasarkan hasil akhir perolehan suara secara nasional Pemilu 2004 menunjukkan bahwa Golkar mendapat suara terbanyak dengan perolehan 24.480.757 (21,57%), PDI Perjuangan di urutan kedua memperoleh dukungan suara sebesar 21.026.629 (18,53%), di urutan ketiga PKB tampil dengan perolehan suara sebesar 11.989.564 (10,57%). PPP bertengger di urutan keempat dengan mendapat 9.248.764 (8,15%) suara, kemudian disusul oleh Partai Demokrat sebagai partai terbaru dalam pemilu ini di urutan kelima dengan dukungan suara sebesar 8.455.225 (7,45%).

Sementara itu Pemilu 2009 diikuti 38 parpol peserta pemilu. Pada 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, dimana 18 partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR RI Periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu

2009. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2004 berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta No. 104/VI/2008/PTUN.JKT, KPU menetapkan 4 (empat) partai politik lagi sebagai peserta Pemilu 2009.

Secara nasional, pada Pemilu 2009 Partai Demokrat memperoleh suara tertinggi sebesar 21.703.137 (20,85%), kemudian disusul oleh Partai Golkar 15.037.757 (14,45%), PDI Perjuangan 14.600.091 (14,03%), PKS 8.206.955 (7,88%), dan PAN 6.254.580 (6,01%). Pada 9 Mei 2009, KPU menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI 2009 setelah 14 hari (26 April 2009 - 9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. Hasil yang diumumkan meliputi perolehan suara berikut jumlah kursi masing-masing partai politik di DPR. Penetapan jumlah kursi kemudian direvisi oleh KPU pada 13 Mei 2009 setelah terjadi perbedaan pendapat mengenai metode penghitungannya. Revisi kemudian kembali dilakukan berdasarkan keputusan MK.

Berbeda dengan perolehan di tingkat nasional, keunggulan suara partai tertentu secara nasional tidak serta-merta merupakan keunggulan pula di Kota Yogyakarta. Secara berturut-turut perolehan suara partai politik di Kota Yogyakarta dalam Pemilu 2004, kemenangan diraih PDI Perjuangan, disusul oleh PAN, Partai Golkar, PKS, dan Partai Demokrat. Sementara itu di Pemilu 2009 Partai Demokrat tampil sebagai juara, disusul oleh PDI Perjuangan, PAN, PKS, dan Partai Golkar.

Nyata jelas bahwa meski secara nasional pada Pemilu 2004 Partai Golkar meraih gelar juara, berbeda halnya yang terjadi di Kota Yogyakarta. Pemilu 2004 di Kota Yogyakarta ditandai dengan kemenangan PDI Perjuangan.

Tabel 2.2:

Perolehan Suara Lima Partai Utama pada Pemilu 2004 di Kota Yogyakarta

No.	Partai Politik	Hasil Pemilu 2004	
		Perolehan Suara	Prosentase
1.	PDI Perjuangan	98.559	25,79%
2.	PAN	94.594	24,76%
3.	Partai Golkar	43.249	11,32%
4.	PKS	40.552	10,61%
5.	Partai Demokrat	35.353	9,25%
6.	Lain-lain	69.800	18,27%
Total		382.107	100%

Diolah dari Data KPUD Kota Yogyakarta, Pemilu 2004

Hasil Pemilu 2004 di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa PDI Perjuangan memenangkan jumlah perolehan suara terbanyak mencapai 98.559 (25,79%), diikuti oleh PAN 94.594 (24,76%), Partai Golkar (43.249) 11,32%, PKS 40.552 (10,61%), dan Partai Demokrat 35.353 (18,27%).

Lain lagi dengan Pemilu 2009, kecuali untuk Pemilu 2009 yang menempatkan Partai Demokrat sebagai pemenang utama secara nasional, di Kota Yogyakarta juga berlaku kondisi semacam itu, secara tegas bahwa Partai Demokrat merupakan pemenang utama pula pada perolehan suara partai politik Pemilu 2009 di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3:

Perolehan Suara Lima Partai Utama pada Pemilu 2009 di Kota Yogyakarta

No.	Partai Politik	Hasil Pemilu 2009	
		Perolehan Suara	Prosentase
1.	Partai Demokrat	55.327	27,60%
2.	PDI Perjuangan	38.409	19,16%
3.	PAN	26.738	13,34%
4.	PKS	20.347	10,15%
5.	Partai Golkar	15.265	7,62%
6.	Lain-lain	44.340	22,12%
Total		200.426	100%

Diolah dari Data KPUD Kota Yogyakarta, Pemilu 2009

Di antara 38 partai politik peserta Pemilu 2009 diketahui terdapat 14 partai politik pendatang baru. Kehadiran parpol-parpol baru tersebut, kemungkinan dapat merubah komposisi perolehan suara partai politik sehingga perolehan suaranya dapat meningkat atau menurun. Perubahan tersebut dapat diakibatkan oleh perubahan sikap politik pemilih.

Dukungan terhadap PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta berkurang karena munculnya partai menengah dan kecil sebagai kontestan pemilu pada waktu tersebut. Pemilu 2004 menempatkan PDI Perjuangan menjadi juara, namun di Pemilu 2009 suara PDI Perjuangan tergerus dan melorot pada posisi *runner up*, Partai Demokrat rupanya berhasil menggondol pemilih PDI Perjuangan. Kaburnya suara dari 'Kandang Banteng' dapat dijelaskan bahwa beberapa pemilih PDI Perjuangan pada 2004 masih setia pada Partai Banteng, sebahagian lainnya pindah ke Partai Demokrat atau selebihnya

hijrah ke partai lain. Persoalan yang sama juga terjadi pada partai-partai lain, meski masih ada yang tetap memilih partai semula, ada yang beralih ke Partai Demokrat. Dukungan terhadap Partai Demokrat bukan berarti semata-mata tetap, adapula yang mengalihkan pilihannya terhadap partai lain, akan tetapi bila dibandingkan arus dukungan yang datang lebih kentara ketimbang yang membelot terhadap partai lain. Selain kesemuanya itu, Partai Demokrat juga dinilai sukses memikat pemilih pemula yang jumlahnya cukup besar.

Magnet suara itu bernama SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), bukan Partai Demokrat. SBY lah faktor utama pendongkrak suara Bintang Tiga Sudut. Dari berbagai survei yang berlangsung menjelang pelaksanaan Pemilu 2009, SBY terus menempati urutan teratas sebagai calon presiden pilihan pada 2009. Pemerintahan Yudhoyono dianggap masyarakat mampu menjawab sejumlah persoalan. Pertama, terkait dengan persoalan keamanan nasional, penyelesaian damai Aceh yang berkejolak sejak 1989. Ini tentu menarik, menimbang peran Jusuf Kalla yang lebih besar dalam hal ini. Papua juga reda walaupun ada riak-riak kecil. Kasus Ambon tidak terjadi lagi.

Di sektor ekonomi, masyarakat melihat secara makro terjadi pertumbuhan yang cukup berkesinambungan, antara 4,5-6 persen setahun. Selain itu, Yudhoyono berhasil membangun citranya yang 'santun' dengan cara berkomunikasi yang tidak emosional.

Masyarakat menganggap Yudhoyono cukup berhasil. Sebaliknya, ketokohan Megawati Soekarnoputri tak mampu mendongkrak suara PDI Perjuangan, Masyarakat sudah pernah mengalami pemerintahan Mega dan membandingkannya.

Sedangkan baik PAN maupun Golkar tak memiliki tokoh yang kuat sebagai ikon. Selain itu, suara PAN dan Golkar juga digeroi pemain baru, pemilih PAN sebelumnya tersedot perhatiannya kepada PMB, sedang untuk Golkar dibayangi dengan semakin menguatnya Gerindra dan Hanura. Faktor terpenting, penurunan angka perolehan suara PAN dan Golkar disebabkan faktor kepemimpinan yang lemah.

Penetapan hasil pemilu anggota legislatif adalah hasil perolehan suara sah peserta pemilu yang digunakan sebagai dasar perolehan jumlah kursi dan penetapan calon anggota legislatif di tiap daerah pemilihan. Perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2009 adalah Partai Demokrat memperoleh 55.327 (27,60%), diikuti PDI Perjuangan 38.409 (19,16%), PAN 26.738 (13,34%), PKS 20.347 (10,15%), dan Golkar 15.265 (7,62%).

Peta permasalahan partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat dihadapkan kepada tuntutan kebutuhan yang tercermin pada prospek peran partai politik dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat hal yang perlu disempurnakan, direvisi, dan bahkan diperbaharui. Hal ini sejalan dengan sebagian tujuan reformasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat pada seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melalui

perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat. Partisipasi politik yang otonom pada hakekatnya merupakan suatu pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang syahih oleh adanya peningkatan partisipasi politik rakyat.